

Analisis Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Eva Safrinja^{1*}, Puti Andiny², Martahadi Mardhani³, Safuridar Safuridar⁴

¹⁻⁴ Program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra, Langsa – Aceh, Indonesia

Email: evasafrinja42@gmail.com¹, putiandiny@unsam.ac.id², martahadi@unsam.ac.id³, safuridar@unsam.ac.id⁴

Alamat: Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Langsa - Aceh

Korespondensi penulis: evasafrinja42@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the effect of income inequality, human development index, and minimum wage on poverty in Aceh Province. It uses secondary data in the form of time series for the period 2009-2023, published by the Central Statistics Agency (BPS) of Aceh Province. The data analysis method employs multiple regression analysis using Eviews 10 software. The results show that income inequality has a negative and insignificant effect on poverty in Aceh Province. Furthermore, the human development index (HDI) has a negative and significant effect on poverty in Aceh Province. Meanwhile, the minimum wage has a positive and insignificant effect on poverty in Aceh Province. Simultaneously, income inequality, the human development index (HDI), and the minimum wage significantly affect poverty in Aceh Province.*

Keywords: *Income, Inequality, HDI, Minimum, Wage*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series* dalam periode 2009-2023 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Metode analisis data menggunakan regresi analisis berganda dengan mengoperasikan *software Eviews 10*. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Selanjutnya indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Kemudian upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara simultan ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kata kunci: Ketimpangan, Pendapatan, IPM, Upah, Minimum

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, melampaui ranah ekonomi ke aspek sosial, politik, dan budaya. Dari perspektif ekonomi, kemiskinan sering kali dipahami sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Todaro et al, 2015). Secara sosial, kemiskinan juga menggambarkan keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan.

Badan Pusat Statistik (dalam Maulana, 2019) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi, materi, dan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur melalui pengeluaran. Indikator kemiskinan ini ditentukan melalui Garis Kemiskinan, yang terbagi menjadi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) untuk kebutuhan kalori minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari dan Garis

Kemiskinan Non Makanan (GKNM) untuk kebutuhan sandang, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh mencatatkan angka kemiskinan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, yang menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2020, Aceh berada pada peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera dan peringkat keenam secara nasional (BPS, 2020). Hal ini mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh Aceh, baik dari segi kualitas sumber daya manusia maupun ketersediaan lapangan kerja yang masih terbatas.

Selanjutnya, pada tahun 2021, Aceh masih menempati posisi tertinggi dalam persentase penduduk miskin di wilayah Sumatera (BPS, 2021), menegaskan bahwa upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di provinsi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Persoalan kemiskinan yang terus berlanjut di Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang merata di berbagai wilayahnya.

Kemudian, data terbaru dari tahun 2022 menunjukkan bahwa Aceh tetap berada dalam lima besar provinsi termiskin di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pembangunan, hasilnya masih belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Tantangan ini menunjukkan kebutuhan akan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam merancang kebijakan serta program-program untuk mengurangi kemiskinan di Aceh, dengan memperhatikan faktor-faktor sosial-ekonomi yang unik di provinsi tersebut (Navoleon et al, 2023).

Isu kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan di Provinsi Aceh. Selama bertahun-tahun, berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, baik melalui program pemerintah maupun inisiatif dari sektor swasta dan masyarakat. Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh dari tahun 2009-2023:

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2009-2023

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Perkembangan (%)
2009	21,61	-
2010	19,95	-7,68
2011	19,48	-2,36
2012	19,46	-0,10
2013	17,60	-9,56
2014	16,98	-3,52
2015	17,08	0,59
2016	16,73	-2,05
2017	16,89	0,96
2018	15,97	-5,45
2019	15,32	-4,07
2020	14,99	-2,15
2021	15,33	2,27
2022	14,64	-4,50
2023	14,45	-1,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Tabel 1 menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh selama periode 2009 hingga 2023. Dalam kurun waktu tersebut, terlihat adanya tren penurunan angka kemiskinan dari 21,61% pada tahun 2009 menjadi 14,45% di tahun 2023, yang mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan. Beberapa tahun mencatat penurunan signifikan, seperti pada tahun 2013 dengan penurunan sebesar -9,56% dan tahun 2018 sebesar -5,45%. Namun, ada juga peningkatan kecil pada tahun-tahun tertentu, seperti di tahun 2015 dan 2017, di mana persentase penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,59% dan 0,96%. Selain itu, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan di tahun 2021, dengan pertumbuhan sebesar 2,27%, meskipun diikuti oleh pemulihan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023.

Kemiskinan timbul akibat berbagai faktor, termasuk upah minimum yang rendah, kualitas hidup masyarakat yang rendah, dan tingginya tingkat pengangguran yang terus meningkat setiap tahun tanpa adanya penambahan peluang kerja (Prayoga et al., 2021). Faktor lainnya merupakan ketimpangan pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai indikator distribusi kesejahteraan, ketimpangan pendapatan dapat menciptakan jurang ekonomi yang dalam antara kelompok kaya dan miskin, sehingga memperbesar tingkat kemiskinan.

Menurut BPS dalam (Herdiansyah, 2020) IPM, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, merefleksikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ketika IPM meningkat, indikator-indikator seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita juga mengalami perbaikan. Hal ini memberikan dampak langsung pada pengurangan kemiskinan, karena masyarakat yang sehat, terdidik, dan memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi lebih mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Sebaliknya, rendahnya IPM sering kali berkontribusi pada peningkatan kemiskinan, karena keterbatasan akses terhadap layanan dasar menghambat mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dari uraian di atas, Provinsi Aceh pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 terjadi fenomena fluktuasi persentase jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Dilihat dari beberapa faktor yang telah dijabarkan di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan tersebut. Dengan mengidentifikasi korelasi antara ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan kebijakan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan, IPM, dan kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam rangka mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan pada periode 2009-2023.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Menurut Nurwati (2008), kemiskinan adalah masalah sosial yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Masalah ini telah berlangsung sejak lama, seiring dengan perjalanan hidup manusia, dan menyangkut berbagai aspek atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan persoalan hidup yang bersifat global, artinya kemiskinan telah menjadi perhatian di seluruh dunia dan ditemukan di setiap negara, meskipun dampaknya berbeda-beda di setiap tempat.

Amartya Sen, dalam Todaro (2015), berpendapat bahwa kemiskinan tidak bisa hanya diukur dari pendapatan atau utilitas sesuai pandangan konvensional. Yang lebih penting bukanlah kepemilikan seseorang atau kepuasan dari barang-barang tersebut, melainkan kemampuan individu memanfaatkan barang yang dimiliki.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan dalam pembangunan suatu daerah tidak dapat dihindari. Daerah-daerah yang tertinggal didorong untuk berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka agar tidak jauh tertinggal dari daerah di sekitarnya. Persaingan antar daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dipicu oleh hal ini, sehingga dampak positif dapat diberikan oleh ketimpangan. Namun, dampak negatif juga muncul akibat tingginya ketimpangan antar wilayah, seperti inefisiensi ekonomi, lemahnya stabilitas sosial dan solidaritas, serta pandangan umum yang menganggap ketimpangan tinggi sebagai sesuatu yang tidak adil (Todaro et al, 2015).

Menurut Todaro dan Smith (2015) ketimpangan pendapatan terjadi akibat perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat, yang menyebabkan disparitas pendapatan antar kelompok dalam masyarakat. Ketidaksamaan dalam pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat disebut sebagai ketimpangan pendapatan, yang mengakibatkan perbedaan mencolok dalam tingkat pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Maskur (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan di antara penduduk berdampak pada peningkatan persentase jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia

Baeti (2013) menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana dampak yang dihasilkan dari upaya peningkatan kemampuan dasar manusia. IPM merupakan salah satu elemen pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dengan penekanan pada pengembangan aspek fundamental manusia. Proses penghitungan IPM melibatkan indikator seperti tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli masyarakat. Semakin tinggi nilai IPM, semakin mendekati pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan itu sendiri merupakan proses menuju perubahan ke arah yang lebih baik.

Menurut BPS dalam (Muqorrobin, 2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: "Usia harapan hidup yang mencerminkan lamanya hidup seseorang sejak lahir; aspek pendidikan, yang dihitung dengan mengombinasikan angka melek huruf pada orang dewasa dengan bobot 2/3 dan rata-rata lama sekolah dengan bobot 1/3; serta standar kehidupan yang layak, yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP Rupiah).

Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usahanya. Upah ini berlaku bagi pekerja lajang dengan pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan serta berlaku selama satu tahun berjalan (Sulistiawati, 2013).

Upah minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam PP tersebut, upah minimum ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kebijakan ini menggantikan aturan sebelumnya dengan memperkenalkan formula baru dalam penetapan upah minimum, baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK).

Hipotesis Penelitian

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
4. Ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk time series dalam periode 2009-2023 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi analisis berganda dengan mengoperasikan *software Eviews 10*, Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kemiskinan

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi Linier Berganda

X1 = Ketimpangan Pendapatan

- X2 = IPM
- X3 = Upah Minimum
- e = *Standart Error*

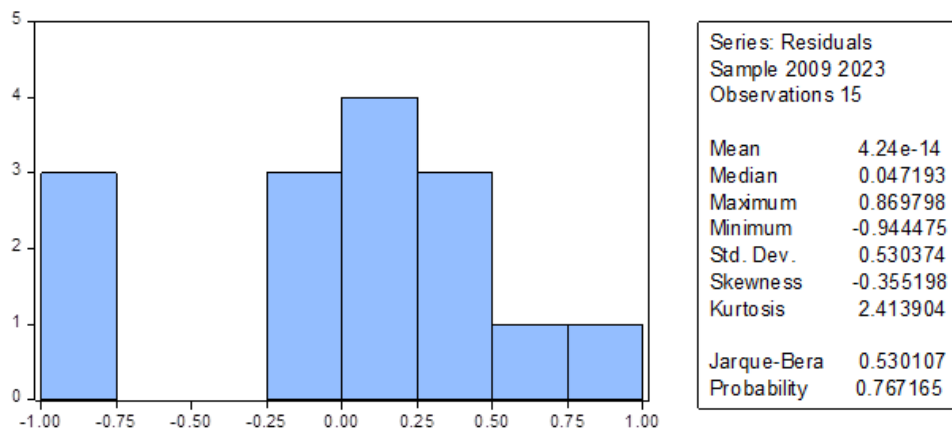
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten (Wibowo, 2013).

1. Uji Normalitas

Gambar 1. Uji Normalitas



Sumber: Data Sekunder, diolah (2024)

Berdasarkan gambar 1 uji normalitas, dapat dilihat bahwa nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,530107 dan *probability* sebesar 0,767165 dimana $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 11/20/24 Time: 15:18			
Sample: 2009 2023			
Included observations: 15			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1195.382	50083.95	NA
KETIMPANGAN_PENDAPATAN	153.5354	642.4298	1.159163
IPM	0.311409	63940.77	9.355342
UPAH_MINIMUM	2.36E-12	554.8989	7.245593

Sumber: Data Sekunder, diolah (2024)

Berdasarkan tabel 2 uji multikolinieritas, dapat dilihat bahwa nilai *Centered VIF* untuk variabel X1, X2 dan X3 yaitu < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.723334	Prob. F(3,11)	0.5588
Obs*R-squared	2.471529	Prob. Chi-Square(3)	0.4805
Scaled explained SS	0.939633	Prob. Chi-Square(3)	0.8159

Sumber: Data Sekunder, diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3 uji heteroskedastisitas diatas dapat dilihat bahwa nilai *free value* pada *probability C-Square(3)* pada *observasi R-Square* sebesar $0,4805 > 0,05$. Maka model regresi tidak ada masalah asumsi Heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.723659	Prob. F(2,9)	0.5112
Obs*R-squared	2.078024	Prob. Chi-Square(2)	0.3538

Sumber: Data Sekunder, diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4 uji autokorelasi nilai *prob chi square(2)* yang merupakan nilai *p value* uji *Breusch-Godfrey serial correlation LM*, yaitu sebesar $0.3538 > 0,05$ artinya residual tidak ada masalah Autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Least Squares				
Date: 11/20/24 Time: 15:14				
Sample: 2009 2023				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	143.3494	34.57430	4.146126	0.0016
KETIMPANGAN_PENDAPATAN	-9.090559	12.39094	-0.733646	0.4785
IPM	-1.847026	0.558040	-3.309842	0.0070
UPAH_MINIMUM	2.62E-06	1.54E-06	1.703442	0.1165
R-squared	0.939642	Mean dependent var		17.09867
Adjusted R-squared	0.923181	S.D. dependent var		2.158815
S.E. of regression	0.598342	Akaike info criterion		2.033871
Sum squared resid	3.938148	Schwarz criterion		2.222684
Log likelihood	-11.25403	Hannan-Quinn criter.		2.031860
F-statistic	57.08223	Durbin-Watson stat		1.700907
Prob(F-statistic)	0.000001			

Sumber: Data Sekunder, diolah (2024)

1. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil analisis tabel 5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 143,3494 - 9,0905 X_1 - 1,8470 X_2 + 2,62 \times 10^{-6} X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi koefisien variabel ketimpangan pendapatan sebesar -9,0905 dan signifikan pada prob. $0,4785 > \alpha = 0,05$. Artinya ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Jika terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 1 indeks, maka kemiskinan di Provinsi Aceh akan menurun secara tidak signifikan sebesar 9,0905 %. Sebaliknya jika terjadi penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 1 indeks, maka kemiskinan di Provinsi Aceh akan meningkat secara tidak signifikan sebesar 9,0905 % dalam satu tahun, *ceteris paribus*.
2. Hasil estimasi koefisien variabel indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar -1,8470 dan signifikan pada prob. $0,0070 < \alpha = 0,05$. Artinya indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. Jika terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 1 indeks, maka kemiskinan di Provinsi Aceh akan menurun secara signifikan sebesar 1,8470 %. Sebaliknya jika terjadi penurunan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 1 indeks, maka kemiskinan di Provinsi Aceh akan meningkat secara signifikan sebesar 1,8470 % dalam satu tahun, *ceteris paribus*.
3. Hasil estimasi koefisien variabel upah minimum sebesar $2,62 \times 10^{-6}$ atau 0,00000262 dan signifikan pada prob. $0,1165 > \alpha = 0,05$. Artinya upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Jika terjadi peningkatan upah minimum sebesar 1 rupiah, maka kemiskinan di Provinsi Aceh akan naik secara tidak signifikan sebesar 0,00000262%. Sebaliknya jika terjadi penurunan upah minimum sebesar 1 indeks, maka kemiskinan di Provinsi Aceh akan menurun secara tidak signifikan sebesar 0,00000262% dalam satu tahun, *ceteris paribus*.

4. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 5 hasil uji F dalam penelitian ini diperoleh *Prob (F-statistic)* sebesar $0,000001 < \alpha = 0,05$. Artinya dapat dinyatakan secara simultan ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima.

5. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Berdasarkan tabel 5 koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) dalam penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,9231 atau 92,31% artinya variabel ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan upah minimum mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2009-2023 sebesar 92,31% sedangkan sisanya sebesar 7,69% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa besaran pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan adalah sebesar -9,0905 dengan nilai signifikan pada prob. $0,4785 > \alpha = 0,05$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Artinya ini mengindikasikan meskipun distribusi pendapatan yang lebih merata dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, dampaknya tidak cukup kuat atau konsisten di Provinsi ini. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, keterbatasan akses kelompok miskin terhadap peluang ekonomi, atau kebijakan redistribusi yang belum optimal.

Pernyataan Myrdal (dalam Nadya, 2019), tentang dominasi *backwash effect* (dampak negatif) di wilayah terbelakang dapat menjelaskan mengapa ketimpangan pendapatan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Aceh. Konsentrasi modal dan investasi di wilayah maju, seperti ibu kota provinsi, memperbesar ketimpangan antar wilayah dan membatasi efek pemerataan pendapatan, sehingga tidak berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan, serta berpotensi memperbesar jurang antar wilayah, sehingga efek pemerataan pendapatan menjadi terbatas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dongoran et al. (2023) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap penduduk miskin di Sumatera Utara.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan

Dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa besaran pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan adalah sebesar sebesar -1,8470 dengan nilai signifikan pada prob. $0,0070 < \alpha = 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Artinya ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang merupakan indikator IPM secara langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Ketika pendidikan dan keterampilan meningkat, masyarakat

memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara akses terhadap layanan kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas.

Teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Amartya Sen dalam (Arsyad, 2020) mendukung hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa pembangunan harus mencakup lebih dari sekadar aspek ekonomi, tetapi juga peningkatan kemampuan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi. Sen menekankan bahwa pembangunan manusia berfokus pada kebebasan individu untuk memanfaatkan kemampuannya demi meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra (2011) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa besaran pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan adalah sebesar sebesar $2,62 \times 10^{-6}$ dengan nilai signifikan pada prob. $0,1165 > \alpha = 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Artinya ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum dapat membebani sektor usaha, terutama usaha kecil dan menengah, yang berujung pada pengurangan tenaga kerja atau peningkatan pengangguran. Selain itu, kenaikan upah minimum dapat memicu inflasi, di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai respons terhadap kenaikan biaya produksi. Kondisi ini memperburuk daya beli kelompok berpenghasilan rendah, khususnya mereka yang tidak memperoleh manfaat langsung dari kenaikan upah. Ketidakseimbangan antara peningkatan upah dan kenaikan biaya hidup dapat menyebabkan tekanan ekonomi yang lebih besar pada masyarakat miskin.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori *Cost push inflation* atau inflasi biaya dorong yang dikemukakan oleh Jain et al., (2022) yang berbunyi inflasi biaya dorong adalah keadaan yang terjadi akibat peningkatan biaya penawaran yang disebabkan oleh kenaikan biaya faktor produksi seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya barang modal, sehingga menciptakan inflasi biaya dorong. Yang menyebabkan perusahaan menaikkan harga produk untuk mempertahankan profitabilitas saat biaya produksi meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra (2011) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji F dengan nilai signifikansi *prob. F-Statistic* sebesar $0,000001 < \alpha = 0,05$. maka dapat dinyatakan bahwa ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Setya (2024) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dalam kajian ini bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Selanjutnya indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Kemudian upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara simultan ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Saran untuk pemerintah Provinsi Aceh agar kebijakan pembangunan lebih difokuskan pada pengurangan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih inklusif. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi prioritas, dengan memperkuat sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara terpadu untuk mengurangi kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan di Provinsi Aceh.

DAFTAR REFERENSI

- Arsyad, L. (2020). *Ekonomi pembangunan*, Edisi kelima. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi*. Badan Pusat Statistik Indonesia
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa) 2009-2023*, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.

- Baeti, N. (2013). Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
- Dongoran, F. R., Dai Sulfina, S., Syah, S. A., & Siahaan, T. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(2), 245-254.
- Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan sektor pendidikan sebagai penunjang indeks pembangunan manusia di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1).
- Jain, M. P., Sharma, A., & Kumar, M. (2022). Recapitulation of demand-pull inflation & cost-push inflation in an economy. *Journal of Positive School Psychology*, 2980-2983.
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., & Alwi, S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran Dn Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2017-2021. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 82-95.
- Maulana, A. (2019). Analisis Elastisitas Investasi dengan Penurunan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1), 1-12.
- Muqorrobin, M. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3).
- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37-52.
- Navoleon, A., & Muljanto, M. A. (2023). Urgensi angka harapan sekolah anak sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 2(3), 110-117.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1-11.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Prayoga, M. L., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 135-142.

- Saputra, W. A., & Mudakir, Y. B. (2011). *Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Setya, M. R. T. (2024). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2023*. Universitas Islam Indonesia.
- Sulistiawati, R. (2013). *Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Politeknik Negeri Pontianak.
- Todaro & Smith, (2015). *Economic Development*. Pearson
- Wibowo, A. S. C. (2013). Pengaruh Pelatihan Dan Kreativitas Terhadap kinerja Karyawan Bagian Teknisi Pada Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(4), 1032-1043.